

PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

13

Eka Budiyantri

Abstrak

Pemerintah menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi 200 proyek dan 13 program sesuai Permenko No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Pemerintah berharap PSN ini dapat selesai pada semester I tahun 2024. Dalam waktu singkat, pemerintah dituntut menyelesaikan tepat waktu. Permasalahan dalam pembangunan PSN antara lain: keterbatasan pembiayaan, sulitnya perizinan, dan keterbatasan ketersediaan lahan. Tulisan ini mengkaji upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian PSN agar tepat waktu dan tepat sasaran. Beberapa upaya tersebut antara lain: menentukan alternatif skema pembiayaan sesuai jenis proyek; promosi kepada swasta; insentif perizinan, pembebasan lahan, dan pajak; stabilisasi harga komoditas; serta menyiapkan perencanaan, target, dan strategi menghadapi isu yang mungkin timbul. Komisi V DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan PSN.

Pendahuluan

Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan pertama kali melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (225 proyek dan 1 program). Tujuan ditetapkannya PSN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. PSN juga diyakini dapat menyediakan lapangan kerja yang luas dan diharapkan mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) terus melakukan pengawasan terhadap progres PSN serta mengevaluasi usulan proyek dan perubahan daftar proyek pada PSN. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono Moegiarso, pemerintah melakukan evaluasi atas PSN dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah masa atau waktu pengerjaannya yang dianggap terlalu panjang, tidak memiliki unsur strategis



yang tinggi, serta mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2022).

Di kuartal III tahun 2022, pemerintah telah melakukan perubahan pada daftar proyek PSN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (200 proyek dan 13 program). Sebelumnya, berdasarkan Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pemerintah menetapkan 208 proyek dan 10 program. Presiden Jokowi berharap pembangunan PSN yang dijadikan prioritas ini dapat selesai paling lambat semester I tahun 2024 (bisnisindonesia.id, 10 Agustus 2022).

Target waktu yang diberikan cukup singkat, padahal sejak ditetapkannya PSN pada tahun 2016, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan PSN seperti keterbatasan pembiayaan, sulitnya perizinan, keterbatasan ketersediaan lahan, dll (kuatbaca.com, 10 Agustus 2022). Permasalahan ini tentunya dapat menghambat tujuan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan PSN. Tulisan ini mengkaji apa saja upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian PSN agar tepat waktu dan tepat sasaran.

Perubahan dan Progres PSN

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, 13 PSN baru ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai sektor (Gambar 1). Pada

sektor teknologi terdapat proyek Palapa Ring Integrasi. Kemudian, di sektor perkebunan terdapat Proyek Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat. Untuk sektor Air Bersih dan Sanitasi terdapat Proyek Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (DKI Jakarta dan Jawa Barat).

Selanjutnya, untuk sektor pariwisata terdapat Proyek Pariwisata Seribu Pulau Kepulauan Seribu (DKI Jakarta). Sementara di sektor kereta api yaitu Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur. Lalu, untuk sektor kawasan terdapat Proyek Pembangunan Kawasan Industri Indonesia (seperti Konawe Industrial Park (KIP)) di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk bendungan, terdapat pembangunan Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh (Aceh). Adapun di sektor energi, pembangunan PLTS Skala Besar di Kepulauan Riau. Sedangkan, sektor pangan yaitu Integrasi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.

Selain itu, dalam PSN ini terdapat tiga proyek smelter yaitu Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Bahodopi (Sulawesi Tengah), Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomala (Sulawesi Tenggara), dan Smelter nikel baterai listrik di Halmahera Timur, Maluku Utara untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Pemerintah menargetkan sampai semester I tahun 2024, 13 PSN yang baru ini akan selesai atau paling tidak sudah mencapai *milestone* tertentu. Adapun capaian progres 13 PSN baru ini bisa berupa *financial close*, *groundbreaking*

| | |
|--------------------------------|---|
| Sektor Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Palapa Ring Integrasi. Kemudian, di sektor perkebunan terdapat. Untuk sektor Air Bersih dan Sanitasi terdapat proyek Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (DKI Jakarta dan Jawa Barat) |
| Sektor Perkebunan | <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat |
| Sektor Air Bersih dan Sanitasi | <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (DKI Jakarta dan Jawa Barat) |
| Sektor Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Pariwisata Seribu Pulau Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) |
| Sektor Kereta Api | <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur |
| Sektor Kawasan | <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Pembangunan Kawasan Industri Indonesia (seperti Konawe Industrial Park (KIP)) di Provinsi Sulawesi Tenggara • Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Sektor Bendungan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh (Aceh) |
| Sektor Energi | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan PLTS Skala Besar di Kepulauan Riau |
| Sektor Pangan | <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo |
| Proyek Smelter | <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Bahodopi (Sulawesi Tengah) • Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomala (Sulawesi Tenggara) • Proyek Smelter nikel baterai listrik di Halmahera Timur, Maluku Utara |

Gambar 1. Daftar Proyek Strategis Nasional Baru

Sumber: diolah

untuk memulai konstruksi, maupun selesainya permasalahan izin dan pembebasan lahan. Pemerintah meyakini tidak akan ada proyek yang tidak jalan atau mangkrak jika proses perizinan, pembiayaan, dan pengadaan tanah dapat selesai hingga tahun 2024 (bisnisindonesia.id, 10 Agustus 2022).

Sampai semester I tahun 2022, pemerintah telah menyelesaikan 7 PSN dengan nilai Rp138,1 triliun yang terdiri dari Kawasan Industri Tanjung Enim; Kawasan Industri Terpadu Batang; Kawasan Industri Weda Bay; Terminal Multipurpose Labuan Bajo; Central-West Java Transmission Line 500 KV; Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo; dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota

Kabupaten Merauke (Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2022, hal. 1). Sedangkan untuk progres dari 13 PSN tersebut saat ini adalah 7 PSN sudah masuk dalam tahap konstruksi, 1 proyek dalam pengadaan badan usaha, dan 5 proyek masih dalam tahap penyiapan. Secara kumulatif, sejak tahun 2016 sampai dengan Juni 2022, setidaknya ada 135 PSN yang sudah selesai dengan nilai investasi sebesar Rp858 triliun (Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2022, hal. 2).

Upaya Pemerintah Mempercepat Penyelesaian PSN

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam percepatan penyelesaian PSN. *Pertama,*

mencari alternatif skema pembiayaan yang paling cocok sesuai dengan jenis proyek agar pembangunannya tepat waktu dan tidak menyisakan proyek mangkrak. Hal ini dilakukan karena mengingat kebutuhan anggaran untuk PSN cukup besar sehingga tidak dapat ditanggung seluruhnya oleh APBN (Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2022, hal. 2). Walaupun pada APBN 2023 pemerintah fokus pada kebutuhan infrastruktur dan PSN, namun dengan kondisi fiskal Indonesia yang rentan seperti saat ini tidak memungkinkan jika seluruhnya ditanggung oleh APBN.

Saat ini pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan terhadap masing-masing proyek. 13 PSN tersebut sebagian besar didorong menggunakan pembiayaan swasta. Sumber pembiayaan dari 13 PSN tersebut antara lain 10 PSN menggunakan pembiayaan swasta, 2 PSN menggunakan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan 1 PSN dengan dukungan APBN (kontan.co.id, 11 Agustus 2022). Adapun sumber dana yang dimanfaatkan adalah KPBU, hingga murni dari swasta saja (Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2022, hal. 1).

Kedua, pemerintah perlu fokus mempromosikan kepada pihak swasta atau investor agar mereka ikut andil membangun PSN. Selama ini peran swasta pada pembangunan PSN cukup besar dalam hal pembiayaan. Berdasarkan Laporan KPPIP Semester II Tahun 2021, porsi pembiayaan terbesar dalam PSN yaitu swasta 69% atau Rp3.879,4 triliun. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan porsi pendanaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 20% atau Rp1.100,5 triliun dan porsi APBN

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 11% atau Rp626,6 triliun. Selain kemampuan pembiayaan yang besar, keunggulan swasta lainnya adalah prinsip kerja yang efisien, efektif, inovatif serta memiliki manajemen risiko yang baik. Hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat pembangunan PSN.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi swasta atau investor dalam berinvestasi pada pembangunan PSN. Kemudahan perizinan ini dapat berupa penyederhanaan regulasi perizinan. Kemudahan fasilitas perizinan yang diberikan pemerintah tentu akan menjadi insentif yang dapat menarik swasta atau investor.

Penyederhanaan regulasi terkait pembebasan lahan juga sangat diperlukan dalam pembangunan PSN. KPPIP mencatat ada 41 proyek yang mengalami permasalahan pengadaan tanah seperti proses pembebasan tanah yang belum selesai, belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan, dan sengketa lahan (kuatbaca.com, 10 Agustus 2022).

Melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah mendukung upaya untuk memberikan kemudahan terkait perizinan dan penyediaan lahan dalam rangka percepatan pembangunan PSN. Diharapkan UU Cipta Kerja ini dapat menarik peran swasta untuk bekerja sama dalam proses percepatan pembangunan PSN.

Selain kemudahan proses perizinan dan pembebasan lahan, insentif pajak juga sangat dibutuhkan bagi swasta atau investor yang mau bekerja sama. Insentif pajak dapat berupa pengurangan ataupun pembebasan tarif.

Keempat, pemerintah perlu memberikan kepastian kepada pelaksana proyek dengan melakukan stabilisasi

harga barang komoditas yang mengalami kenaikan. Hal ini perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi global saat ini penuh dengan ketidakpastian dan telah menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang komoditas. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, kondisi ini memberikan dampak pada proyek-proyek PSN, yaitu pelaksana proyek sulit untuk menyusun perencanaan (tempo.co, 16 Agustus 2022).

Kelima, pemerintah perlu menyiapkan secara komprehensif terkait perencanaan, target atau pencapaian, serta strategi untuk mengatasi isu atau kendala yang mungkin timbul saat pembangunan PSN. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat bekerja sesuai target dan tahapan yang sudah direncanakan sehingga pembangunan PSN dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran (kompas.com, 10 Agustus 2022).

Keseluruhan upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses penyelesaian pembangunan PSN yang rencananya ditargetkan selesai sampai semester I tahun 2024. Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap progres pembangunan PSN mulai dari perencanaan, proses tahapan pembangunan, sampai selesainya pembangunan. Tujuannya, agar jangan sampai proyek PSN yang sudah selesai dibangun tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak tepat sasaran, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat terutama di sekitar pembangunan PSN.

Penutup

Dengan adanya perubahan PSN baru dengan target waktu penyelesaian yang singkat, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan PSN tepat waktu dan tepat sasaran. Ada beberapa upaya yang dapat

dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan PSN, antara lain menentukan alternatif skema pembiayaan sesuai jenis proyek; promosi kepada swasta; insentif perizinan, pembebasan lahan, dan pajak; stabilisasi harga komoditas; serta menyiapkan perencanaan, target, dan strategi menghadapi isu yang mungkin timbul.

Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap proyek maupun program pada PSN yang dijalankan pemerintah mulai dari perencanaan, proses tahapan pembangunan, sampai selesainya pembangunan. Diharapkan pemerintah dapat menyelesaikan pembangunan PSN dengan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian nasional.

Referensi

“Cek di Sini, 13 Proyek Strategis Nasional Terbaru 2022”, 10 Agustus 2022, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/10/194000921/cek-di-sini-13-proyek-strategis-nasional-terbaru-2022>, diakses 16 Agustus 2022.

“Kemenkeu Jelaskan Imbas Kenaikan Harga Barang ke Proyek PSN”, 16 Agustus 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1623125/kemenkeu-jelaskan-imbas-kenaikan-harga-barang-ke-proyek-psn>, diakses 16 Agustus 2022.

Laporan KPPIP Semester II Tahun 2021, https://kppip.go.id/wp-content/uploads/filebase/laporan_semester_kppip/Laporan_KPPIP_semester_2_2021.pdf, diakses 16 Agustus 2022.

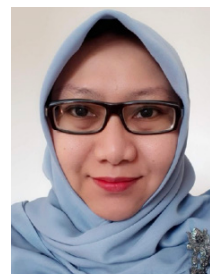
“Memprioritas Proyek Strategis Nasional”, *Bisnis Indonesia*, 11 Agustus 2022, hal. 2.

“Menata Ulang Deretan Daftar Proyek Strategis Nasional Baru”, 10 Agustus 2022, <https://bisnisindonesia.id/article/menata-ulang-deretan-daftar-proyek-strategis-nasional-baru>, diakses 16 Agustus 2022.

“Pemerintah Nyerah Tuntaskan PSN”, 10 Agustus 2022, <https://kuatbaca.com/telik/detail/pembangunan/pemerintah-nyerah-tuntaskan-psn-254>, diakses 16 Agustus 2022.

“Pemerintah Tetapkan 13 Proyek Strategis Nasional Baru, Berikut Daftarnya”, 11 Agustus 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tetapkan-13-proyek-strategis-nasional-baru-berikut-daftarnya>, diakses 16 Agustus 2022.

“Utak-Atik Proyek Prioritas”, *Bisnis Indonesia*, 11 Agustus 2022, hal. 1.



Eka Budiyanti
eka.budiyanti@dpr.go.id

Eka Budiyanti, S.Si., MSE., menyelesaikan pendidikan S1 Matematika Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Depok pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya bidang kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Menuju Industri Keuangan Syariah yang Berkelanjutan di Era Digital” (2019), “Perkembangan Potensi Industri Makanan dan Minuman Halal Indonesia” (2020), dan “*Building Energi Between Indonesia's Traditional and Modern Retail Industries with e-Commerce*” (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.